

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dengan semakin terbukanya era globalisasi mengakibatkan semua aspek kehidupan harus dipersiapkan untuk bersaing dalam globalisasi tersebut. Dengan kondisi seperti ini, diprediksi bahwa isu-isu permasalahan kesejahteraan sosial akan semakin berkembang, karena terjadi benturan-benturan kepentingan di antara aspek-aspek kehidupan manusia. Suatu kenyataan bahwa hasil dari benturan-benturan kepentingan dimaksud pada akhirnya akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahan sosial. Permasalahan politik berujung pada permasalahan sosial, permasalahan ekonomi berujung pada permasalahan sosial, persoalan hukum berujung dengan permasalahan sosial, persoalan teknologi berujung dengan permasalahan sosial, dan lain-lain. Tetapi, tidak pernah terjadi bahwa permasalahan ekonomi berakhir dengan permasalahan politik dan berhenti hanya di situ saja. Tetapi, dipastikan akan berakhir dengan permasalahan sosial.

Pada situasi seperti ini, permasalahan sosial akan semakin bertambah dan bervariasi, tidak hanya masalah sosial konvensional saja seperti permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia, tetapi berbagai permasalahan sosial baru seperti pemutusan hubungan kerja, tawuran, kerusuhan antar etnis, kesewenang-wenangan, penghakiman sendiri, termasuk di dalamnya permasalahan kelompok masyarakat mulai dari kelompok kelas bawah hingga kelompok elit, seperti disharmonisasi keluarga, stress, dan lain-lain. Sudah barang tentu permasalahan sosial seperti ini sangat bervariasi

Secara umum ada beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun *civil society* untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial, yang pertama dan utama, adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. Maknanya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (**PMKS**), yakni mereka yang termasuk kelompok kurang beruntung (*disadvantaged groups*), seperti orang miskin, anak-anak dan wanita korban tindak kekerasan, anak jalanan, pekerja anak, orang dengan kemampuan berbeda (difabel), serta kelompok rentan dan marjinal lainnya. Pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, asuransi sosial, jaring pengaman sosial, dan penguatan kapasitas kelompok marjinal adalah beberapa contoh program pembangunan kesejahteraan sosial.

Sasaran *Millenium Development Goals (MDGs)* mengamanatkan kepada kita bahwa dalam kurun waktu 1990 hingga 2015 kita harus bahu membahu dalam menangani berbagai permasalahan berikut, yaitu: (a) *eradicate extreme poverty and hunger*; (b) *achieve universal primary education*; (c) *promote gender equality and empowerment*; (d) *reduce child mortality*; (e) *improve maternal health*; (f) *combat HIV/AIDS, malaria and other diseases*; (g) *ensure environmental sustainability*; (h) *develop a global partnership for development*. Kita menyadari bahwa pencapaian sasaran **MDGs** ini adalah merupakan hal yang cukup berat dan harus ditangani secara bersama-sama baik antar lembaga atau kementerian terkait bahkan antar negara baik regional maupun internasional. Bagaimana amanat **MDGs** ini dapat diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan kongkrit oleh masing-masing negara atau kementerian/lembaga. Ini adalah menjadi tanggungjawab kita bersama, tidak hanya Kementerian Dalam Negeri, atau Kementerian Sosial tetapi semua Kementerian atau lembaga yang ada termasuk masyarakat.

Di masa mendatang, permasalahan sosial ini akan semakin kompleks dan besar dan selalu terkait dengan isu-isu yang lainnya. Karena itu, isu-isu tersebut sepertinya harus diantisipasi perkembangannya sehingga permasalahan

sosial tidak menyebar dan berkembang apa lagi membawa dampak yang lebih besar, yang ujung-ujungnya akan berdampak pada disfungsi sosial.

Secara nasional isu-isu strategis yang muncul antara lain: (1) penajaman target sasaran berdasarkan pendekatan targetting (kegiatan, sasaran, lokasi), (2) sinergi dan keterpaduan program/kegiatan, sasaran dan lokasi antara yang ditetapkan Kemensos dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, (3) keserasian penganggaran dana dekonsentrasi, dan tugas perbantuan, dana perimbangan, DAK, DAU, Dana Bagi Hasil, (4) penentuan indikator kinerja yang terukur, (5) kesepakatan pembiayaan bersama antara APBN dan APBD untuk komponen sub kegiatan di masing-masing kegiatan, (6) pembiayaan komponen sub kegiatan "publikasi" pada tiap kegiatan, dan (7) analisis anggaran berdasarkan indeks kemahalan pada beberapa provinsi. Pola Keterkaitan RPJPD dan RPJMD Provsu, Renstra-Dinkesos, RKPD Provsu dan Renja Dinkesos dapat terlihat pada diagram sebagai berikut.

POLA KETERKAITAN RPJPD PROVSU, RENSTRA-DINKESOS, RKPD PROVSU DAN RENJA DINKESOS

RPJPD

1. Visi
2. Misi
3. Arah Pembangunan Daerah

R K P D PROVSU

1. Mengadopsi Komponen 1 –5 pada RPJMD

2. Kegiatan* (berpedoman pada Indikasi Kegiatan RPJMD)

• LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1954 tentang Undang-undang;
3. Undang-undang nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
4. Undang-Undang RI No. 33 PRPS Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan.
5. Undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia;
7. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kesejahteraan Sosial;
13. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
14. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

16. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009;
20. Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
21. Permensos No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
22. Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara N 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018.
25. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 17 tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara.

• **MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategi Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan selama lima tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program, serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategi ini adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan bidang kesejahteraan sosial, serta merumuskan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) SKPD serta terselenggaranya keteraturan dalam penyusunan program kegiatan dan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

• **SISTIMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan Rencana Strategis Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD

Bab III : Isue-Isue Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara Yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok dan masyarakat yang tergolong penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti fakir miskin, anak terlantar, penyandang Disabilitas, korban bencana alam dan sosial serta bencana lainnya, gelandangan, pengemis dimana kelompok masyarakat ini perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki berbagai keterbatasan sehingga sering kali mereka tertinggal dalam proses pembangunan yang berakibat kurang dapat menikmati hasil pembangunan.

Bentuk pelayanan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dimaksud adalah melalui sistem “panti” dan “luar panti”. Sistem *panti* memberikan pelayanan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam suatu lokasi unit pelayanan teknis dan dalam jangka waktu yang relatif lama.

Sistem *luar panti* memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di lokasi tempat tinggal mereka dan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Di Sumatera Utara terdapat 20 unit panti dengan sasaran garapan sebagai berikut:

No	Jenis Panti	Sasaran Garapan	Jumlah	Penghuni	Lokasi
1	Panti Asuhan	Anak terlantar	5 unit	440 orang	Kabanjahe, Sidikalang, SiborongBorong, G.Sitoli, P.Sidimpuan
2	Panti-Sosial Tempat Penitipan Anak	Anak Balita	1 unit	110 orang	Medan
3	Panti Jompo	Lansia Terlantar	5 unit	310 orang	Binjai, Asahan, Rantau Parapat, Siborongborong, P. Siantar
4	Panti Rehabilitasi Disabilitas	Penyandang Disabilitas	4 unit	377 orang	T. Tinggi, Siantar, Sei Buluh, Berastagi
5	Panti Sosial Bina Remaja	Remaja Putus Sekolah	1 unit	165 orang	T. Morawa
6	Panti Rehabilitasi Tuna Sosial :Wanita Tuna Susila	WTS	1 unit	80 orang	Berastagi
	Gelandangan Pengemis	Gelandangan Pengemis	2 unit	320 orang	Binjai, Tapteng,
7	Pelayanan Pembinaan Eks Penyakit Kusta	Penyandang Eks Penyakit Kusta	1 Unit	900 orang	Belidahan

- **SUMBER DAYA DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA.**

Sumber Daya Manusia yang menjadi penopang Tugas, Fungsi dan Tangung Jawab Dinas Kesejahteraan dan Sosial per 31 Desember 2012 sebanyak 540 orang adalah sebagai berikut :

Jabatan Fungsional :

- Jabatan Peksos : 77 orang
- Jabatan Penyuluh : 7 orang
- Jabatan Arsiparis : 1 orang
- Jabatan Analisis Kepegawaian : –
- Jabatan Widyaswara : –

Jabatan Struktural :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 18 orang
- Eselon IV : 28 orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan / fungsional / jabatan dan golongan, yaitu :

1. Menurut skala pendidikan

- S2 : 12 orang
- S1 : 166 orang
- D3/SM : 52 orang
- D1 : 1 orang
- SLTA : 285 orang
- SLTP : 16 orang
- SD : 8 orang

JUMLAH : 540 orang

2. Menurut fungsi / jabatan (struktural)

- Kepala Dinas : 1 orang
- Sekretaris : 1 orang
- Kepala Bidang : 4 orang
- Kepala UPTD : 13 orang
- Kepala Seksi : 12 orang
- Kepala Sub Bagian : 16 orang

JUMLAH : 47 orang

3. Berdasarkan golongan

- Golongan I : 9 orang
- Golongan II : 125 orang
- Golongan III : 382 orang
- Golongan IV : 19 orang

JUMLAH : 540 orang

- **KINERJA PELAYANAN DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dari Evaluasi Kinerja diperoleh beberapa alasan rasional dan keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja dalam kaitannya dengan upaya pencapaian Visi dan Misi organisasi strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan kinerja (input, output, outcome, benefit dan impact).

Pengukuran Kinerja SKPD pada Tahun 2009 – 2013, dilakukan dengan perbandingan antara realisasi kinerja dan target kinerja pada dokumen penetapan kinerja Tahun 2009-2013 dan disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebagai arah pelaksanaan program kegiatan Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara. (Tabel 2.1 dan 2.2)

Seiring dengan kemajuan dibidang kesejahteraan sosial yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini (2009-2013 berjalan), disadari pula bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Sumatera Utara masih diwarnai aneka permasalahan sosial yang belum terselesaikan. Memasuki tahun 2013, Provinsi Sumatera Utara masih tetap dihadapkan pada permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana dan tindak kekerasan; baik masalah yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pembangunan kesejahteraan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan pada umumnya telah memberi kontribusi peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata. Sasaran utama program pembangunan kesejahteraan sosial adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan dan kegiatan-kegiatan program.

Tabel 2.1 yang berupa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara selama periode 2009-2013 yang sedang berjalan memperlihatkan bagaimana target dan realisasi capaian yang telah dituangkan di dalam Renstra Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara yang termaktub di dalam 5 bidang urusan pemerintahan/sub urusan/program kegiatan seperti: 1. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, 2. Program perlindungan dan jaminan Kesejahteraan Sosial, 3. Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, 4. Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan, 5. Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata di Sumatera Utara melalui pencapaian kinerja pelayanan Kesejahteraan Sosial yang telah diperlihatkan pada tabel 2.1 dengan lima bidang program kegiatan. Ratio capaian setiap tahun memperlihatkan angka yang fluktuatif yang terkadang masing-masing sub kegiatan sudah mencapai di atas 100 persen dan sub bidang yang lain belum mencapai 100 persen. Secara kualitatif capaian-capaian tersebut paling tidak telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dan pemeliharaan iklim yang kondusif di Sumatera Utara selama kurun lima tahun terakhir (2009-2013). Untuk tahun 2013 yang sedang berjalan ratio capaian rata-rata sudah berjalan baik dan bahkan beberapa sub kegiatan sudah mencapai 100 persen walaupun masih ada yang baru tercapai sekitar 20 - 40 persen. Atas dasar dan asumsi capaian selama kurun lima tahun terakhir dan dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang di dalam kehidupan masyarakat, baik perubahan-perubahan ditataran regional dan global, maka perencanaan strategis jangka menengah yang merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang dan acuan rencana tahunan perlu dirumuskan dengan mengedepankan prioritas-prioritas; sasaran program, lokasi dan kegiatan yang dapat segera mengurangi beban masalah dan dapat mendukung terwujudnya visi Sumatera Utara melalui pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 – 2018, yang tidak hanya

ditujukan kepada masyarakat rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial saja, melainkan juga pada keberfungsian dan keberdayaan sosial masyarakat secara lebih komprehensif.

Kita menyadari bahwa dalam mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJMD tahun 2014-2018, maka peran semua sektor pembangunan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya. Perubahan yang terjadi pada setiap bidang pembangunan, akan saling mempengaruhi dan berdampak terhadap perkembangan di bidang lainnya. Oleh karenanya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyadari betapa perlunya fungsi pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dalam rangka mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti masalah kemiskinan dan keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan melalui berbagai program dan kegiatan seperti: 1. Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya, 2. Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, 3. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, 4. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan, 5. Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Dengan demikian berarti bahwa Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial melalui upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut dan dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Masyarakat Sumatera Utara, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup masyarakat Sumatera Utara, di mana bila kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, yang pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial dan menurunkan harkat dan martabat bangsa.

- **TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD.**

Pemahaman masyarakat akan tugas dan fungsi Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara dipandang sebagai pemberian seperti anggapan bahwa Dinas Kesejahteraan dan Sosial berfungsi karikatif (hanya memberi bantuan pada penyandang Disabilitas dan fakir miskin atau korban bencana sebagai derma/sumbangan). Bukan melihatnya sebagai bagian integral dari pembangunan Sumatera Utara secara umum dan menyeluruh.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cepat menimbulkan peningkatan jumlah dan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum diimbangi oleh sumber daya manusia yang professional.

Ada beberapa tantangan dan masalah yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah di masa mendatang, yaitu: (1) pelaksanaan otonomi daerah dan upaya pengembangan sistem implementasi UU No. 32 tahun 2004; (2) menurunkan tingkat kemiskinan yang jumlahnya semakin besar dan penanganan isu-isu strategis dan global, seperti: ketenagakerjaan, integrasi sosial, lingkungan hidup, HAM, demokratisasi, kesetaraan jender, kemitraan global, dan sebagainya; (3) perlunya kajian baru untuk melihat arah, orientasi dan bentuk program pembangunan kesejahteraan sosial; (4) peningkatan “peranserta” masyarakat dalam semua kegiatan.

Dari isu global dan nasional seperti yang telah disebutkan di atas, maka isu-isu strategis pembangunan kesejahteraan sosial yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

- **Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat, yang meliputi:**

1. Masalah sosial keluarga miskin.
2. Masalah sosial pengembangan potensi Karang Taruna, PSM, Orsos
3. Masalah sosial keluarga yang mengalami hambatan sosial psikologis.
4. Masalah sosial psikologis masyarakat (seperti: perasaan rasa aman, kebebasan, dan lain- lain).
5. Masalah sosial keluarga rawan ekonomi, seperti: janda, PHK, dll.
6. Masalah sosial pengembangan dan penanaman nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan.
7. Masalah sosial peningkatan peranan dan fungsi lembaga perlindungan anak.
8. Masalah sosial peningkatan peranan dan fungsi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).

- **Permasalahan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, meliputi:**

1. Masalah sosial penyandang Disabilitas.
2. Masalah sosial penyalagunaan narkotika.
3. Masalah sosial kenakalan remaja (seperti: tawuran, perkelahian sesama remaja, perlawanan terhadap guru, perampokan, pembajakan, dan lain-lain).
4. Masalah sosial tuna sosial.
5. Masalah sosial HIV / AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome).
6. Masalah sosial peningkatan fungsi dan peranan Lembaga Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
7. Masalah sosial kesejahteraan sosial lanjut usia.
8. Masalah kesejahteraan sosial anak balita terlantar.
9. Masalah sosial anak putus sekolah.
10. Masalah sosial peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan.
11. Masalah sosial kesejahteraan sosial lanjut usia.
12. Masalah kesejahteraan sosial anak balita terlantar.
13. Masalah sosial anak putus sekolah
14. Masalah sosial peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan.

- **Permasalahan Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang meliputi:**

1. Masalah sosial kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.
2. Masalah sosial penanggulangan korban bencana.
3. Masalah sosial korban tindak kekerasan.
4. Peningkatan sumbangan sosial.
5. Pemberian asuransi kesejahteraan sosial.
6. Masalah sosial integrasi antara etnis (kerusuhan).

Sebagai tindak lanjut dan tanggung jawab instansi sosial maka Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara menyusun Rencana Strategis 2014-2018 dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan amanat Undang-undang no.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana strategis yang disusun merupakan penjelasan dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara serta dengan memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh.

Selanjutnya Rencana Strategis akan menjadi dokumen perencanaan lima tahun ke depan sebagai wujud kontribusi Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam mengisi pembangunan di Sumatera Utara khususnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Dengan demikian Rencana Strategis akan menjadi acuan/pedoman jajaran Dinas Kesejahteraan dan Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

BAB III

ISUE-ISUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara.**

Dibandingkan dengan besaran PMKS di Sumatera Utara sesuai dengan data yang dimiliki Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara, maka jumlah PMKS yang dapat menerima pelayanan sosial relatif sangat kecil. Pada tahun 2012 PMKS yang menerima pelayanan dari sumber dana APBD Provinsi hanya sebanyak 1.032 orang dan 2840 KK serta PMKS dalam Panti Pemerintah 1.802 Orang. Bila dibandingkan dengan jumlah PMKS yang 1.276.930 orang maka yang menerima pelayanan sosial hanya 0,009 %.

Koordinasi dan sinergi program baik dengan Kementerian Sosial RI maupun Pemerintah Kab/ Kota sudah terjalin dengan baik khususnya melalui forum Musrembang Provinsi dan Rapat Koordinasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial bagi Dinas/ Instansi Sosial Kab/ Kota. Sedangkan dengan Kementerian Sosial RI dilakukan dalam forum Musrembang (RKP, Renja, RKA) dan evaluasi pelaksanaan program.

Bagian terbesar dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial dimaksud adalah *fakir miskin/keluarga miskin* yang berjumlah 817.958 KK

Perlindungan dan kesejahteraan sosial berkaitan dengan masalah kemiskinan, keDisabilitas, keterlantaran, ketuna-sosialan dan bencana alam/bencana sosial/bencana non alam.

Rendahnya kualitas penanganan keDisabilitas berdampak pada kondisi dimana penyandang Disabilitas masih menghadapi kendala untuk kemandirian, produktifitas dan hak untuk hidup normal yang meliputi antara lain akses ke pelayanan sosial dasar, hal ini berkaitan dengan terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis keDisabilitas serta aksesibilitas terhadap pelayanan umum untuk mempermudah kehidupan masyarakat.

Masalah ketunasiswaan yang terdiri dari gelandangan, pengemis serta tuna susila, selain disebabkan oleh kemiskinan juga diakibatkan ketidakmampuan individu untuk hidup dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Peristiwa bencana alam merupakan kejadian yang sulit diperkirakan secara tepat sehingga sering timbul kelemahan-kelemahan dalam penanganan pada saat bencana telah terjadi.

Disamping itu sikap sebagian warga masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah rawan bencana yang menghambat penanganan bencana.

Masalah keterlantaran sebagai akibat dari kemiskinan yang terjadi pada anak, keluarga serta lanjut usia.

Dengan demikian isu-isu strategis dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Ketersediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak memadai.
2. Penerapan Perda tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang belum sepenuhnya direspon oleh Instansi Sosial Kabupaten / Kota.
3. Populasi keluarga miskin yang relatif besar, sementara alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan belum memadai.

4. PNS di lingkungan Instansi Sosial Kabupaten / Kota didominasi oleh PNS yang bukan berlatar belakang pendidikan profesi pekerjaan sosial.
5. Intensitas mutasi PNS di Instansi Sosial Kabupaten / Kota yang cukup tinggi.
6. Sarana Prasarana Panti Sosial di lingkungan Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara yang sangat minim baik jumlah maupun kualitasnya.

- **TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Pada dasarnya Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara mengedepankan upaya peningkatan kemampuan Sumatera Utara sebagai suatu kekuatan yang memiliki daya saing tinggi ketika dihadapkan dengan Provinsi – Provinsi yang lain di Sumatera bagian Utara.

Dalam kaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara maka Misi Gubernur dan wakil Gubernur terpilih yang dapat diimplementasikan melalui program kegiatan Dinas Kesejahteraan dan Sosial adalah **Misi yang ke-IV** yaitu “**Meningkatkan Kualitas Standar Hidup Layak, Kesetaraan dan Keadilan serta Mengurangi ketimpangan Antar Wilayah**” dengan tujuan “**Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat yang berkeadilan**” Sasaran dari misi yang dimaksud adalah “**meningkatnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat yang berkeadilan**” maka program kegiatan Dinas kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai sasaran tersebut adalah Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang berada di lingkup Provinsi Sumatera Utara.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- **RENCANA PROGRAM**

- **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Terbangunnya kerjasama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin, berkembangnya geografi informasi sistem (gis) bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

- **Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :**

1. Peningkatan pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin melalui bimbingan motivasi, pelatihan keterampilan usaha dan pemberian modal usaha.
2. Membangun kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan kelompok fakir miskin
3. Peningkatan pemberdayaan komunitas adat terpencil secara bertahap, mengembangkan geografi informasi sistem (GIS) bagi pemetaan.
4. Peningkatan kemampuan (capacity building) bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.
5. Peningkatan kemampuan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya,
6. Peningkatan dukungan administrasi dan operasional program.

- **Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial**

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam dan sosial sehingga dapat memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); terlaksananya pemulangan bagi pengungsi yang dapat dikembalikan ke daerah asal; bantuan terminasi; terlaksananya bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah dan terlaksananya sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh dan PMKS lainnya, program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Menyediakan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya.
2. Menyediakan bantuan pemulangan/terminasi bagi korban bencana alam, bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan orang terlantar.
3. Menyediakan bantuan stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam dan bencana sosial.
4. Memberikan bantuan persiapan bagi daerah penerima pengungsi dan pekerja migran bermasalah.
5. Memberikan bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui usaha ekonomi produktif.
6. Menyelenggarakan sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh dan PMKS lainnya.
7. Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap pemberian bantuan korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya.
8. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

- **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dan memberikan bantuan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS untuk kelangsungan hidup dan pengembangannya.

Program ini juga bertujuan agar terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial ; terlaksananya pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak serta korban tindak kekerasan, terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak Disabilitas, dan anak nakal serta lanjut usia; terlaksananya pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk korban bencana; terbentuknya pusat informasi penyandang Disabilitas dan trauma center dan terlaksananya kampanye, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi serta konseling mengenai anti eksploitasi perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
2. Mengembangkan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang Disabilitas lansia.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesejahteraan sosial bagi PMKS,
4. Meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi,
5. Melakukan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak Disabilitas, anak nakal dalam dan luar panti,
6. Memberikan pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk korban bencana,
7. Membentuk pusat informasi penyandang Disabilitas dan trauma center
8. Melakukan kampanye, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi sert konseling mengenai anti eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak dan kekerasan secara nasional maupun lokal.
9. Melakukan komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi eks penderita kusta, eks napi dan masyarakat.
10. Melakukan kampanye sosial pencegahan penyalahgunaan napza.
11. Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
12. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

- **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan, kepedulian, pelestarian dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial dan ketahanan sosial masyarakat, khususnya organisasi sosial (orsos) Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Relawan sosial, organisasi sosial masyarakat lainnya, meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan termasuk pendayagunaan sumber dana sosial, dan berkembangnya jejaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat, yang ditandai dengan jumlah PMKS yang dilayani.

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) relawan sosial, karang taruna, orsos termasuk kelembagaan sosial.
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS,
3. Membentuk jejaringan kerjasama penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat termasuk orsos,
4. Meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan,

5. Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial,
6. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program,
7. Melakukan bulan bakti masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam swadaya pembangunan.

5.1.5 Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial melalui penelitian masalah sosial, penataan sistem dan pengembangan alternatif intervensi pelayanan sosial, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; penetapan standarisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial; pengembangan sistem informasi penanganan masalah kesejahteraan sosial; penataan sistem peraturan dan perundang-undangan kesejahteraan sosial; peningkatan pemahaman hukum dan perundangan yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial.

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Melakukan pengkajian, penelitian, pelatihan dan pendidikan manajemen pelayanan sosial;
2. Melakukan penataan sistem dan mekanisme kelembagaan termasuk perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
3. Melakukan pengkajian dan penelitian mengenai peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
4. Menyusun dan menetapkan standarisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Mengembangkan sistem informasi dan publikasi mengenai pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
6. Mengintegrasikan data dan informasi mengenai PMKS ke dalam survei dan sensus nasional;
7. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program serta pelaporan kegiatan.

• Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

1. Peningkatan penyuluhan kesejahteraan sosial, khususnya di daerah kumuh, perbatasan, terpencil, rawan konflik, rawan bencana, dan gugus pulau;
2. Peningkatan kualitas dan kuatitas penyuluhan sosial melalui media massa cetak dan elektronik; dan
3. Peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial melalui pelatihan teknis komunikasi.

• **KEGIATAN INDIKATOR KINERJA**

PROGRAM / KEGIATAN

A. PEMBERDAYAAN SOSIAL FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA.

1. Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di Daerah Pesisir/ Nelayan
2. Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di Pedesaan
3. Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di Perkotaan
4. Peningkatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
5. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Pendamping Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan KAT
6. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
7. Pembinaan dan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
8. Pembinaan dan Pemberian Bantuan bagi Keluarga Rentan
9. Pembinaan dan Pembentukan KUBE di Lokasi Binaan PKK Terpadu
10. Pembinaan dan Pelatihan bagi LK3
11. Pembinaan LKM dan KUBE Fakir Miskin

B. PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL.

1. Pembinaan UEP Anak Jalanan
2. Pembinaan dan Pemberian Bantuan Stimulance UEP Ortu Anjal
3. Pertemuan, Pemantapan dan Pemberian Bantuan bagi Organisasi Lanjut Usia
4. Pelaksanaan Razia Tuna Sosial, Anjal dan Disabilitas
5. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi WTS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya keterampilan dan adanya usaha yang dimiliki bagi keluarga miskin guna mencapai keluarga mandiri.

Meningkatnya ketrampilan dan adanya usaha yang dimiliki bagi keluarga miskin didaerah pesisir pantai / nelayan.

Meningkatnya keterampilan dan adanya usaha yang dimiliki bagi keluarga miskin didaerah pertanian/pedesaan

Meningkatnya Keterampilan dan adanya usaha yang dimiliki bagi keluarga miskin didaerah perkotaan

Meningkatnya pemahaman dan tata kehidupan dan Norma KAT

Meningkatnya keterampilan petugas

Meningkatnya Keterampilan dan Taraf Hidup Perempuan Miskin

Meningkatnya Ketahanan Sosial Keluarga

Meningkatnya Ketahanan Sosial Keluarga

Terbentuknya KUBE

Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan terhadap LK3 di Provsu

Meningkatnya Keterampilan dan motivasi untuk mengembangkan usaha bagi LKM dan KUBE Fakir Miskin

Meningkatnya Fungsi Sosial Para PMKS Untuk kelangsungan dan Pengembangan Hidupnya

Meningkatnya Kemampuan Kemandirian Anak Jalanan

Meningkatnya penghasilan orangtua anak jalanan

Terbinanya organisasi Lanjut Usia

Meningkatnya kesadaran TS, Anjal dan Disabilitas

Tercapainya kemandirian bagi WTS

6. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Gelandangan dan Pengemis	Tercapainya kemandirian bagi Gelandang dan Pengemis
7. Bimbingan Pencegahan HIV/ AIDS	Tercapainya Pencegahan HIV/AIDS
8. Pembinaan dan penanganan panti asuhan / jompo	Lancarnya operasional pelayanan standart minima pada panti pemerintah dan panti swasta serta penyandang masalah sosial lainnya
9. Pelatihan dan Pemanapan UEP Penyandang Disabilitas	Meningkatnya kemampuan ekonomi bagi penyandang Disabilitas
10. Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan bagi UPT	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana UPT Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provsu
11. Pembinaan dan Bantuan Remaja Putus Sekolah	Terbinanya remaja yang putus sekolah
12. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan UEP Tuna Netra	Terbinanya penyandang Disabilitas Tuna Netra
13. Bimbingan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Eks Penyakit Kronis	Terbinanya penyandang Eks Penyakit Kronis
14. Pembinaan dan Pelatihan bagi penyandang Disabilitas	Terbinanya para penyandang Disabilitas
15. Pembinaan dan Pemberian Bantuan UEP bagi Eks NAPZA	Terbinanya para penyandang eks NAPZA
16. Pembinaan UEP Anak Terlantar	Terbinanya anak terlantar
17. Pembinaan Lanjut Usia Potensial	Terbinanya Lanjut Usia yang potensial
18. Pembinaan dan Bantuan Bagi Pemulung	Terlaksananya pembinaan terhadap Pemulung
19. Pembinaan dan Bantuan Bagi Kaum Minoritas	Terlaksananya pembinaan terhadap Pemulung
20. Pembinaan dan Pemberian Bantuan bagi bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan	Terbinanya Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan di Provsu
21. Sosialisasi Pengadopsian Anak / Pengasuhan Anak	Tersosialisasinya Informasi tentang pengadopsian /Pengasuhan Anak
22. Rehab Ruang Trauma Center	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Trauma Center
23. Pengadaan alat bantu penyandang Disabilitas dan lanjut usia	Terlaksananya pengadaan alat bantu penyandang Disabilitas dan lanjut usia
24. Bantuan Modal Usaha dan Penyelenggaraan HIPENCA	Terlaksananya pemberian bantuan modal usaha dan penyelenggaraan HIPENCA

C. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

1. Bimbingan Pengembangan Desa Pelopor Pembangunan Kessos	Terinformasinya PMKS dan PSKS kepada Masyarakat
2. Pembinaan dan Penumbuhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Meningkatnya Kemampuan dan Ketrampilan PSM

- | | |
|--|---|
| 3. Pembinaan dan Penumbuhan Karang Taruna | Tercapainya Program Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tingkat Provinsi |
| 4. Pembinaan dan Kerjasama TKSK | Tercapainya Program Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tingkat Provinsi |
| 5. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Sosial Desa | Meningkatnya Kemampuan Orsos dalam Pelayanan Sosial |
| 6. Verifikasi dan Pembinaan Terhadap LKS | Tercapainya verifikasi dan pembinaan terhadap LKS |
| 7. Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat | Terbentuknya WKSBM yang menangani permasalahan sosial |
| 8. Pembinaan dan Kerjasama Kelembagaan Dunia Usaha | Tercapainya Program Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tingkat Provinsi |
| 9. Pertemuan Forum Komunikasi PSM | Meningkatnya Kemampuan PSM dalam memecahkan Permasalahan Kessos Masyarakat dan Pemerintah mengetahui hasil karya dan potensi Karang Taruna Desa/Kelurahan |
| 10. Karang Taruna EXPO | Masyarakat lebih mengetahui kegiatan Karang Taruna se Sumatera Utara |
| 11. Penerbitan Majalah Getar | Tertanamnya Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan terhadap masyarakat |
| 12. Pembinaan dan Penyuluhan Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan | Keluarga Veteran yang mempunyai usaha |
| 13. Pembinaan dan Penyantunan Keluarga Veteran Tidak Mampu | Ditetapkannya orang penerima penghargaan karena peran aktif menyelenggarakan pelayanan sosial pada masyarakat |
| 14. Penilaian Pemberian Penghargaan bagi Pihak yang berperan aktif menyelenggarakan Pelayanan Sosial pada Masyarakat | Terlaksananya Rapat Koordinasi PSKS Provinsi |
| 15. Rapat Koordinasi PSKS Provinsi | Terlaksananya pembinaan BK3S di Provinsi Sumut |
| 16. Pembinaan BK3S Provsu | Terlaksananya pembinaan dan Penumbuhan terhadap Keluarga Pioner |
| 17. Pembinaan dan Penumbuhan Keluarga Pioner | Terlaksananya pembinaan dan Penumbuhan terhadap Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial |
| 18. Pembinaan dan Penumbuhan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial | Terlaksananya pengembangan Karang Taruna |
| 19. Pengembangan Karang Taruna | Terlaksananya Penyelenggaraan HKS |
| 20. Penyelenggaraan HKS | Terlaksananya Penyelenggaraan Karang Taruna |
| 21. Bulan Bakti Karang Taruna | Terlaksananya Penyelenggaraan Sosialisasi Keberadaan Orsos |
| 22. Sosialisasi tentang Keberadaan Orsos | Terlaksananya Pemantapan Petugas Pelaksanan Organisasi Sosial |
| 23. Pemantapan Petugas Pelaksanan Organisasi Sosial | |

D. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

1. Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana
 2. Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 3. Monitoring dan Operasional Penanggulangan Bencana
 4. Distribusi Permakanan (Lauk Pauk, Evakuasi Korban Bencana)
 5. Penyediaan Peralatan Penanggulangan Bencana
 6. Rapat Koordinasi TAGANA se-Sumatera Utara
 7. Pemetaan Daerah Rawan Bencana
 8. Sosialisasi Korban Tindak Kekerasan bagi Pengguna Pembantu Rumah Tangga
 9. Sosialisasi Program Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
 10. Pembinaan dan Latihan Keterampilan bagi Korban Tindak Kekerasan
 11. Pembinaan Keserasian Sosial Daerah
 12. Pembinaan Pelaksana Asuransi Kesejahteraan Sosial Sosial (ASKESOS)
 13. Bimbingan Pemantapan dan Bantuan bagi Pendamping dan Operator PKH
 14. Bantuan Tali Asih Tagana
 15. Pembinaan Pengusaha, Orsos dan Masyarakat tentang Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang/Barang
 16. Sosialisasi Pelaksanaan UGB dan Pengumpulan Uang/Barang
- Meningkatnya pemahaman terhadap dampak bencana dan meningkatnya taraf hidup masyarakat korban bencana**
- Meningkatnya Kualitas TAGANA dalam Penanganan Shelter dan Dapur Umum serta Ketrampilan TAGANA dalam pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana
- Meningkatnya kesiapsiagaan warga terhadap adanya bencana
- Data Derah rawan bencana dapat dijadikan sebagai bahan pengajuan Program Pemberian bantuan kepada Korban Bencana
- Bantuan sandang dan pangan dapat tersedia di kab./kota rawan bencana pada masa tanggap darurat
- Terpenuhinya Peralatan yang dibutuhkan pada saat Bencana
- Tercapainya Persamaan Persepsi terhadap tugas dan fungsi TAGANA Sumatera Utara
- Tersedianya Peta Daerah Rawan Bencana sebagai bahan pengajuan Program Penanganan daerah rawan bencana
- Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Korban Tindak Kekerasan bagi Pengguna Pembantu Rumah Tangga
- Masyarakat semakin memahami tentang Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTK – PM)
- Pulihnya kembali Fungsi Sosial Korban Tindak Kekerasan untuk bersosialisasi kepada Masyarakat
- Tersusunnya Pedoman Keserasian Sosial yg menjalin hubungan harmonis diantara elemen – elemen masyarakat multikultur di Sumatera Utara
- Terlaksananya pembinaan Askesos
- Meningkatnya Kemampuan Pendamping dan Operator PLH dalam Pelaksanaan PKH
- Terlaksananya bantuan operasional terhadap Tagana
- Pemahaman Masyarakat tentang UGB dan PUB semakin meningkat agar Penyimpangan dalam pelaksanaan UGB dan PUB semakin berkurang
- Pemahaman Masyarakat tentang UGB dan PUB semakin Meningkatkan agar Penyimpangan dalam Pelaksanaan UGB dan

17. Pengaspalan Jalan/Halaman Gudang Bencana

PUB semakin Berkurang

Terlaksananya pengaspalan jalan dan halaman parkir gudang bencana

18. Monitoring Penyaluran Baffer Stock pada Gudang di Kab/Kota

Terlaksananya Penyelenggaraan Monitoring Penyaluran Baffer Stock pada Gudang di Kab/Kota

19. Pembinaan dan Latihan Keterampilan bagi Pekerja Migran

Pulihnya kembali Fungsi Sosial Pekerja Migran Kekerasan untuk bersosialisasi kepada Masyarakat

E. PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Meningkatnya kader yang terbentuk dalam memperkuat integrasi sosial di lingkungan; dan kelompok penyuluhan sosial di lokasi rawan bencana dan konflik;

1. Penyuluhan Sosial Keliling

Terinformasikannya PMKS dan PSKS kepada Masyarakat

2. Pelatihan dan Penataran Tenaga Penyuluh Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial

3. Penyuluhan Sosial Daerah Tertinggal

Terlaksananya Penyuluhan Sosial Daerah Tertinggal

4. Penyuluhan Sosial Rawan Bencana

Terlaksananya Penyuluhan Sosial di daerah rawan bencana

5. Penyuluhan Sosial Gugus Pulau

Terlaksananya Penyuluhan Sosial Gugus Pulau

F. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Meningkatnya sistem dan mekanisme kelembagaan, termasuk standar dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial; Tersedianya sistem informasi dan data penyandang masalah sosial.

1. Rapat koordinasi daerah pembangunan bidang kesejahteraan social

Meningkatnya kerja sama antar instansi terkait dan terlaksanya rapat

2. Sosialisasi Pengumpulan dan Pengolahan Data PMKS ke Kab/ Kota

Tersedianya data PMKS

3. Penyusunan dan pembuatan lakip,laporan tahunan dan LKPJ

Meningkatnya kualitas laporan tahunan dan LKPJ

4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pemahaman dan keberhasilan dalam program Pembangunan Kesejahteraan Sosial

5. Penyusunan Program dan Rencana Kerja Dinas Kesejahteraan dan Sosial Prov. SU

Tersusunnya Program dan Rencana Kerja

6. Sosialisasi Penanganan PMKS

Terinformasikannya penanganan PMKS di Provinsi Sumatera Utara

7. Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial

Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial

8. Rapat Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Terselenggaranya Rapat Kerja dalam rangka Tugas – Tugas Teknis UPT dan Bidang – Bidang pada Dinas Kesejahteraan Sosial Prov. SU

- | | |
|--|--|
| 9. Pertemuan Penyusunan RKA dan DPA | tercapainya penyusunan RKA dan DPA tepat waktu |
| 10. Pemantapan Petugas Aplikator RKA –DPA | Meningkatnya pengetahuan petugas Aplikator |
| 11. Penyusunan dan Sosialisasi SPM, NSPK, SOP dan Juknis Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial | Tercapainya Penyusunan dan Sosialisasi SPM, NSPK dan SOP Bidang Sosial tepat waktu |
| 12. Kajian/Penelitian Upaya Penanggulangan dan Perlindungan PMKS | Terlaksananya Kajian/Penelitian Upaya Penanggulangan dan Perlindungan PMKS |
| 13. Sistem Jaringan Informasi Kesejahteraan Sosial | Tercapainya Sistem Jaringan Informasi Kesejahteraan Sosial |
| 14. Analisis Anggaran Responsif Gender | Terlaksananya analisis anggaran berbasis gender |
| 15. Rancang bangun Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Sumatera Utara Berbasis Web | Meningkatnya pengetahuan petugas Aplikator |

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVSU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provsu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut :

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2014-2018) ; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Periodisasi Renstra Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara ini disesuaikan masa jabatan kepala daerah terpilih, yakni 2013-2018.

Rencana dan Strategi Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014–2018, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 (Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009), serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

KEPALA DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL

PROVINSI SUMATERA UTARA,

Drs. ALEXIUS PURBA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19541212 198103 1 015